

# Perlukah Budaya Tanding?

**Ariel Heryanto**

PARA mahasiswa aktivis kita ternyata masih menghargai "pendekatan budaya". Mereka masih merasa perlu membikin "Sumpah Mahasiswa" di tahun 1988. Sebagian merasa perlu memperingatinya lima tahun kemudian.

Terlepas dari persoalan setuju atau tidak pada isi Sumpah Mahasiswa itu, sikap mereka terhadap budaya itu penting, dan sangat menggembirakan. Ini perlu ditekankan karena kita hidup di jaman pelecehan terhadap kekuatan budaya. Pelecehan demikian dikerjakan oleh mereka yang fanatik terhadap anangan-anangan akan kekuatan ekonomi atau politik. Baik di kalangan konglomerat, birokrat, pemerintahan, mau pun demonstran yang menggugat kedua jenis penguasa itu.

#### Aksi lawan informasi?

Salah satu ciri aktivisme mahasiswa sesudah diberlakukannya NKK/BKK adalah kesadaran akan kelemahan gerakan mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka tidak lagi cukup berpuas diri dengan keengganan bercorak moral. Mereka ingin menegaskan diri sebagai suatu gerakan politik tanpa rasa malu, salah atau takut. Bahkan ada rasa bangga, karena pada waktu itu politik ditabuk lewat depolitisasi besar-besaran (NKK/BKK).

Aktivis mahasiswa pasca-NKK juga ditandai, minimal pada tahun 1980-an, oleh kesadaran akan teori strukturalisme kiri yang bersifat materialis dan populis. Teori favorit ini kemudian berkembang menjadi kesadaran spontan dan keseharian. Menjadi bagian dari bahasa retoris, slogan dan propaganda mereka. Persoalan yang mereka renungkan bukan lagi kebejatan moral penjahat, pemurnian nilai-nilai Pancasila atau kepribadian Timur. Mereka mempersoalkan tanah rakyat, hak-asasi, hak-mogok, negara, dan kapitalisme. Lebih galak dari Sumpah Mahasiswa 1988.

Dalam kerangka pemikiran seperti itu, bisa dipahami bila mereka tidak terlalu berselera membicarakan masalah-masalah kebudayaan. Perlu diingat apa yang mereka kenal sebagai kebudayaan biasanya hanya kebudayaan berjuasi atau kolonial Barat (kemanusiaan, universalisme, nasionalisme, modernisasi) yang sedang dominan dalam masyarakatnya. Seolah-olah, kebudayaan secara esensial merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan yang konservatif. Bukanlah kebanyakan pidato birokrat yang membosankan berbicara tentang kebudayaan? Bukan politik.

Kecenderungan meremehkan kebudayaan di kalangan para aktivis mahasiswa itu lebih kuyup ketika generasi kelompok diskusi digantikan oleh generasi demonstrasi jalanan. Radikalisme intelektualisme di ruangan tertutup digantikan oleh radikalisme berpawai dan 'mimbar

bebas di depan pasukan anti huru-hara. Pelecehan terhadap potensi perlawanan budaya mencapai klimaksnya ketika ada sisa-sisa kelompok diskusi yang secara pribadi bertengkar dengan pribadi lain dari kelompok demonstran yang baru muncul dengan semangat tempur menggebu-gebu.

Kita menyaksikan sebuah adegan yang lucu tapi pahit, ketika perselisihan dan pergeseran *locus radikalisme* kaum muda terpelajar kota di Jawa ini kemudian digambarkan seolah-olah sebagai pertengangan antara kubu diskusi lawan kubu aksi. Atau, antara kubu radikalisme informasi/budaya lawan radikalisme praktis/politik. Dengan rontoknya (untuk sementara waktu) para tokoh "kelompok diskusi", slogan "kaum aksi" bergema tanpa ejekan: "Berhentilah berpikir dan berdiskusi. Aksi!"

Para aktivis di luar pulau Jawa mungkin akan bingung jika mengikuti perdebatan seperti itu. Dari berbagai peristiwa yang selama ini dapat diikuti di media massa, belum ada gerakan mahasiswa di Jawa tahun 1980-1990-an yang benar-benar pantas menyandang gelar hebat "aksi" sebagai lawan dari gerakan informasi/budaya/diskusi.

Tak terdengar ada aksi mahasiswa merebut istana presiden. Atau sidang kabinet. Tidak juga terdengar aksi teror dan kekerasan politik di pusat-pusat kerumunan khalayak. Tidak terdengar aktivis mahasiswa di Jawa ini melakukan pembajakan pesawat terbang, penculikan atau penyanderaan politikus penting untuk pembebasan tahanan politik atau perubahan kabinet. Belum ada berita tentang aksi para mahasiswa yang memanggul senapan ke hutan-hutan dan mengadakan perperangan gerilya.

Tak sedikit aktivis seusia mereka di luar pulau Jawa dan di luar wilayah Indonesia terlibat dalam aksi-aksi politik seamacam itu. Begitu pula para pemuda dan mahasiswa militer Indonesia pada masa-masa yang telah lampau, khususnya sebelum kemerdekaan.

Jadi apa yang dimaksudkan dengan istilah gagah "aksi" oleh para aktivis mahasiswa yang suka mengolok-olok kelompok diskusi intelektual itu? Mereka berdemonstrasi, menyampaikan petisi, memasang poster, memfoto-copy selebaran gelap, atau mengadakan dialog dengan anggota parlemen, atau salah satu pejabat pemerintahan. Hanya dalam kasus yang sangat langka, ada aksi mahasiswa menyandera rektor atau menduduki kantor rektor. Sekali lagi, rektor. Bukan gedung parlemen atau markas besar ABRI.

Secara umum, aksi gerakan mahasiswa ini tidak banyak berbeda dari kesibukan rekanannya yang suka berdiskusi atau berpolemik di koran. Yang satu menuliskan buah pikirannya lewat kolom opini. Yang lain

menulis petisi atau poster dan minta wartawan untuk membe-ritakannya di koran yang sama. Yang satu berdiskusi di ruang seminar. Yang lain berdiskusi di mimbar bebas atau gedung DPR. Keduanya meminta perhatian publik dan Negara. Keduanya minta dicatat sejarah. Keduanya berharap ikut terlibat perubahan sosial. Keduanya menjalankan aksi informasi. Keduanya bisa menggugat kesadaran publik.

Bedanya, kelompok yang menyebut diri kelompok aksi bekerja lebih sulit dan menempuh risiko lebih berat. Tapi belum terbukti hasil kerja mereka lebih efektif mendorong perubahan ke arah yang dicita-citakan mereka sendiri ketimbang kelompok lain yang berdiskusi, berpolemik, atau membaca sajak. Kelompok yang menamakan diri kelompok aksi lebih sering melibatkan non-mahasiswa (pedagang kaki lima, petani, buruh). Kalau mereka kelihatannya seakan-akan lebih penting daripada kelompok diskusi, hal ini tentunya berkat jasa para aparatur keamanan negara. Lewat serangkaian tindakan represif (penangkapan, bentrokan fisik di depan umum, interrogasi, penyiksaan, pengadilan dan hukuman penjara) pemerintah telah mengangkat derajat kepahawanan mereka.

#### Propaganda dan sensor

Mungkin sudah saatnya para aktivis "aksi" lebih menghargai potensi budaya tanding seperti yang dikerjakan oleh penyusun Sumpah Mahasiswa. Atau mereka yang mencoba memperingatinya. Bukan isi Sumpah Mahasiswa itu sendiri yang paling penting dan perlu disanjung tinggi, tetapi kesadaran akan potensi budaya tanding.

Di mana pun di dunia ini tak pernah ada suatu kekuasaan yang bisa stabil bila hanya mengandalkan modal fisik. Entah itu bersifat kekerasan represif (penangkapan, penculikan, pembunuhan, atau hukuman penjara) atau insentif (hadiah-hadiah). Kompeni Belanda tak akan mungkin menguasai Hindia Belanda seandainya mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik. Modal harta dan senjata mereka terlalu sedikit untuk Hindia Belanda. Begitu pula nasib minoritas kulit putih di Afrika Selatan atas orang kulit hitam.

Sebaliknya, pemberontakan terhadap penjajahan Belanda tidak dapat dipadamkan hanya oleh hadiah-hadiah fisik. Para pejuang nasionalis Indonesia berteriak "merdeka atau mati" walaupun mereka tahu pemerintah penjajah telah memberikan "pembangunan" jangka panjang tahap pertama: jalan raya, pelabuhan, perumahan, listrik, irigasi, taman-taman kota, rumah sakit, sekolah, hukum, perpustakaan dsb. Maka orang di Jawa tidak perlu heran bila masih ada keresahan di luar pulau Jawa, walaupun di sana telah dilimpahi prioritas pembangunan besar-besaran.

Setiap kekuasaan hanya dapat berlangsung stabil bila berhasil berkuasa secara kebu-

dayaan pula. Dalam bentuk yang paling kasar, hal itu dijalani oleh banyak penguasa di dunia dalam dua bentuk: propaganda (produktif) dan sensor (represif).

Propaganda merupakan kegiatan aktif penguasa memberikan pemberitahuan resmi kepada publik tentang tata tertib yang berlangsung dalam masyarakatnya. Lewat sekolah, pidato, penataran, upacara, sidang-pengadilan, warta-berita, pertunjukkan kesenian, dsb. Penguasa yang tidak pandai-pandai berpropaganda akan menghadapi Gerakan Pengacau Keamanan di bidang kebudayaan.

Sensor merupakan kegiatan represif penguasa untuk menindas aktivitas pihak lain. Sensor hanya dikerjakan penguasa yang tidak stabil. Yang senantiasa dihantui rasa takut berman-

cam-macam. Sensor hanya dikerjakan penguasa dalam keadaan darurat, karena ia merupakan semacam pengakuan kepada khalayak bahwa ada kebenaran yang ingin disembunyikan si penguasa.

Kebudayaan memang bukan medan utama berlangsungnya keadilan sosial ataupun penindasan terhadap keadilan tersebut. Tapi wilayah kebudayaan tidak pernah tidak berperan penting dalam proses berlangsungnya kekuasaan, yang adil maupun yang tidak. Penguasa yang cerdas tidak akan memehkan wilayah ini. Begitu pula kaum cerdas yang membangkang terhadap kekuasaan itu.

Itu sebabnya dalam banyak masyarakat politik ada baju seragam. Juga ada baju yang diharamkan. Ada tanggal yang

dicetak dengan cat merah di kalender. Ada pesta perayaan, hari besar dan upacara peringatan tertentu. Ada tokoh yang dipahlawakan dan peristiwa dikeramatkan. Ada pula yang dikutuk. Ada foto-foto pembesar dan poster-poster yang dipasang di tempat terhormat. Ada gambar dan buku yang dilarang atau dibakar.

Terlepas dari apa yang dicitakan para aktivis mahasiswa Indonesia pada masa ini, tampaknya mereka tak banyak mengenal potensi kebudayaan sebagai pergulatan politik. Mereka sibuk (dan sesekali asyik) bersitegang dengan para petugas keamanan berpangkat rendahan di lapangan. Kadang-kadang para aktivis ini malah mengajak berdebat aparat ber-seragam yang sebenarnya hanya menjalankan tugas atasan. Seperti disemboyangkan sejumlah aktivis: mereka ini "berhenti berpikir" dan hanya akan bertindak.

Mungkin itu sebabnya para aktivis mahasiswa sangat jarang melukis poster, menulis

cerpen, mengadakan upacara peringatan kejadian-kejadian penting yang dialami pihak yang dibela atau rekan-rekan seperjuangannya. Kesibukan mereka hampir selalu sesaat dan setempat. Kalau pun ada perayaan peringatan hari besar, biasanya hanya buntut perayaan internasional (misalnya hari HAM). Mereka tak punya kalender dengan tanggal-tanggal yang dicetak cat merah untuk mengenang kesedihan atau kegembiraan para pendahulunya. Mereka tak kenal sejarah sendiri. Perjuangan mereka tak pernah bersifat edukatif bagi adik-adik mereka.

Mungkin itu sebabnya setiap demonstrasi mereka hanya bisa menyanyi lagu-lagu pra-kemerdekaan, seperti "Padamu Negeri", atau "Halo-halo Bandung". Mereka tak punya lagu-lagu ciptaan tahun 1990-an yang bisa mengungkapkan aspirasi mereka di masa ini. \*\*\*

*\*) Ariel Heryanto, staf pengajar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga*